



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 54 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026**



**BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN PURBALINGGA**



<https://bappelitbangda.purbalinggakab.go.id/>



[bappelitbangda@purbalinggakab.go.id](mailto:bappelitbangda@purbalinggakab.go.id)



Jalan Jambu Karang No. 8 Purbalingga



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2026 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-2 (dua) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III  
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2025-2029.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Tenaga Kerja;
  - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
  - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
  - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - s. Dinas Pertanian;
  - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - u. Sekretariat Daerah;
  - v. Sekretariat DPRD;
  - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - x. Badan Keuangan Daerah;
  - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
  - z. Inspektorat Daerah;
  - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
  - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
  - dd. Kecamatan Kemangkon;
  - ee. Kecamatan Bukateja;
  - ff. Kecamatan Kejobong;
  - gg. Kecamatan Kaligondang;
  - hh. Kecamatan Purbalingga;
  - ii. Kecamatan Kalimanah;
  - jj. Kecamatan Kutasari;
  - kk. Kecamatan Mrebet;
  - ll. Kecamatan Bobotsari;
  - mm. Kecamatan Karangreja;
  - nn. Kecamatan Karanganyar;
  - oo. Kecamatan Karangmoncol;
  - pp. Kecamatan Rembang;
  - qq. Kecamatan Bojongsari;
  - rr. Kecamatan Padamara;
  - ss. Kecamatan Pengadegan;
  - tt. Kecamatan Karangjambu;
  - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo

anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra PD Tahun 2025-2029, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Agustus 2015

BUPATI PURBALINGGA

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 54

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 54 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 141);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2026 ini dengan baik.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penyempurnaan rancangan renja perangkat daerah sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dengan memperhatikan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah yang telah disepakati.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran, masukan dan dukungan dari berbagai pihak guna kesempurnaan dokumen Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2026 sehingga dokumen ini dapat terselesaikan. Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2026 Bappelitbangda dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan publik yang lebih baik, serta dapat mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Purbalingga, 08 Juli 2025

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA' at the top and 'BAPPELITBANGDA' at the bottom. The center of the stamp contains the text 'BAPPELITBANGDA' and 'KABUPATEN PURBALINGGA'. A blue ink signature is written across the stamp.  
**Drs. SUROTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700203 199001 1 001

## DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026 .....	i
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 54 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026 .....	viii
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2024 .....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra .....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	49
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	66
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	67
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	67
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	70
3.3 Program dan Kegiatan.....	73
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	78
BAB V. PENUTUP.....	93
BAB III. PENUTUP (LAMPIRAN PERBUP).....	95

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sampai dengan Tahun 2025.....	12
Tabel II.2	Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024 .....	27
Tabel II.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	28
Tabel II.4	Perbandingan Komponen Perencanaan AKIP Tahun 2020 s.d 2024 .....	28
Tabel II.5	Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Bappelitbangda Tahun 2024 .....	31
Tabel II.6	Rekapitulasi Konsistensi Jumlah dan Nomenklatur Program RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029 .....	33
Tabel II.7	Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Litbang Bappelitbangda Tahun 2024 .....	38
Tabel II.8	Penerapan dan Fasilitasi Kelanjutan Inventor Purbalingga Tahun 2015-2023 .....	39
Tabel II.9	Pencapaian Kinerja Tujuan Urusan Penunjang Bappelitbangda Tahun 2024 .....	42
Tabel II.10	Nilai Komponen Tingkat Kematangan Bappelitbangda.....	43
Tabel II.11	Nilai Setiap Komponen SAKIP Bappelitbangda Tahun 2023 dan 2024 .....	44
Tabel II.12	Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Penunjang Bappelitbangda Tahun 2024 .....	44
Tabel II.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga .....	46
Tabel II.14	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Purbalingga .....	52
Tabel II.15	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Purbalingga .....	66
Tabel III.1	Tema Pembangunan dan Prioritas Nasional Tahun 2026 .....	67
Tabel III.2	Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 .....	68
Tabel III.3	Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2026 .....	73
Tabel III.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2026 .....	74
Tabel IV.1	Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 .....	79

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara tegas mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional yang dimaksud tersebut terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai institusi perencana memiliki peran penting dalam merumuskan kinerja pembangunan, dimulai proses perumusan konsep perencanaan, tahapan dan mekanisme analisa perencanaan sampai pada pengendalian dan evaluasi program pembangunan. BAPPEDA memegang kendali dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang dicita-citakan baik dalam rencana jangka panjang, jangka menengah maupun jangka tahunan.

Dalam tahapan perencanaan terdapat beberapa dokumen yang harus disusun, baik di tingkat nasional maupun daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana pembangunan di daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Renja Perangkat Daerah juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan, pada tahun 2026 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2025-2029.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- f. penetapan Renja Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2026;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor .....);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor .... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor .....);

19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga.

#### **2. Tujuan**

- a. Menyediakan pedoman dalam menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang disusun berpedoman pada Renstra perangkat daerah dan RKPD.
- b. Memberi acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappelitbangda Tahun 2026.
- c. Mendorong terwujudnya sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam semua dokumen perencanaan mulai dari RKPD, KUA/PPAS sampai pada penyusunan RKA tahun 2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja OPD Tahun 2026 adalah :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

##### **TAHUN 2024**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB V. PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2026 didasarkan pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra**

Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 telah dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Renja Bappelitbangda tahun 2024 melaksanakan 4 program, 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan.

Pada tahun 2024, pelaksanaan program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menunjukkan hasil yang memuaskan dengan capaian yang sesuai target kinerja yang ditetapkan. Dari tiga program utama dan satu program penunjang yang direncanakan, seluruhnya berhasil dilaksanakan dengan tingkat pencapaian yang optimal. Hal ini menunjukkan komitmen Bappelitbangda dalam mengimplementasikan rencana kerja secara konsisten dan berkelanjutan, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda 2025-2029. Setiap program dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan yang mencakup berbagai aspek yang menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Setiap kegiatan ini dirancang untuk mendukung pencapaian 5 kinerja yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan tersebut berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan, yang diukur melalui indikator kinerja yang jelas dan terukur. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada pencapaian target kinerja adalah perencanaan yang matang dan koordinasi yang efektif antar unit kerja di Bappelitbangda. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan tantangan yang mungkin dihadapi, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasinya. Selain itu, penggunaan sumber daya yang efisien dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan juga menjadi kunci sukses dalam mencapai target yang ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappelitbangda 2024 ini juga memberikan implikasi positif terhadap pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Dengan tercapainya target kinerja pada tahun ini, Bappelitbangda mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi perencanaan dan penganggaran di tahun-tahun berikutnya, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil semakin mendekatkan Kabupaten Purbalingga pada visi dan misinya. Kebijakan perencanaan dan penganggaran ke depan akan lebih fokus pada upaya peningkatan kualitas program dan kegiatan, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pencapaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Sampai dengan Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) \times 100}{100}$	9	$10 = 9 + 7$	$11 = \frac{(10/4) \times 100}{100}$
			Indikator	Satuan						
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01	PERENCANAAN									
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Presentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	persen	100	100	100	100	100	100

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) * 100}{100}$	9	$10 = 9 + 7$	$11 = \frac{(10/4) * 100}{100}$
		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.01.20 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.01.20 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	dokumen	2	2	50	2	6	50
5.01.01.20 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25	Laporan	5	5	100	5	15	60
5.01.01.20 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan anggaran yang di tindaklanjuti	100	Persen	100	100	100	100	100	100
5.01.01.20 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155	Orang/bulan	27	27	100	29	85	54,8

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} * 100$	9	$10 = 9 + 7$	$11 = \frac{10}{4} * 100$
5.01.01.20 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1280	Dokumen	226	232	102,65	265	795	62,1
5.01.01.20 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	6010	dokumen	600	600	100	600	1813	30,2
5.01.01.20 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan BMD yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	500	persen	100	100	100	100	300	60
5.01.01.20 3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	10	laporan	2	4	200	2	6	60
5.01.01.20 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkatkan kompetensinya	172	orang	43	43	100	43	86	50
5.01.01.20 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	55	orang	11	11	100	11	29	52,72
5.01.01.20 5.10	Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan	172	orang	43	43	100	43	86	50

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} * 100$	9	$10 = 9 + 7$	$11 = \frac{10}{4} * 100$
	Peraturan Perundang-Undangan	teknis implementasi peraturan perundang-undangan								
5.01.01.20 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	60	bulan	12	12	100	12	36	60
5.01.01.20 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	30	paket	5	5	100	5	16	53,3
5.01.01.20 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	95	paket	9	9	100	8	76	80
5.01.01.20 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120	dokumen	12	12	100	24	60	50
5.01.01.20 6.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60	laporan	12	12	100	12	36	60
5.01.01.20 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	60	laporan	12	12	100	12	36	60

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} * 100$	9	$10 = 9 + 7$	$11 = \frac{10}{4} * 100$
		koordinasi dan konsultasi SKPD								
5.01.01.20 6.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	99	dokumen	24	24	100	24	51	51,5
5.01.01.20 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36	buah	14	14	100	0	24	66,6
5.01.01.20 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29	unit	14	14	100	0	24	82,7
5.01.01.20 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60	bulan	12	12	100	12	36	60
5.01.01.20 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	22	Laporan	6	3	50	5	10	45,5
5.01.01.20 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	60	Laporan	12	12	100	12	36	60

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) * 100}{100}$	9	$10 = 9 + 7$	$11 = \frac{(10/4) * 100}{100}$
		daya air dan listrik yang disediakan								
5.01.01.20 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10	Laporan	2	5	250	2	7	70
5.01.01.20 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	70	Laporan	14	14	100	14	42	60
5.01.01.20 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	60	bulan	12	12	100	12	36	60
5.01.01.20 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	165	unit	29	29	100	29	58	35.2

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} * 100$	9	$10 = 9 + 7$	$11 = \frac{10}{4} * 100$
5.01.01.20 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50	unit	25	25	100	25	50	100
5.01.01.20 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	unit	1	1	100	1	2	40
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur dokumen perencanaan	100	persen	100	87.5	87.5	100	187.5	187.5
		Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program	84.2	persen	82.3	84.02	102.09	83	82.99	98.6
		Presentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.02.20 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	100	100	100	100	100	100

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) * 100}{100}$	9	$10 = 9 + 7$	$11 = \frac{(10/4) * 100}{100}$
5.01.02.20 1.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1420	dokumen	284	284	100	284	852	60
5.01.02.20 1.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	25	berita acara	5	5	100	5	15	60
5.01.02.20 1.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	15	dokumen	3	3	100	3	9	60
5.01.02.20 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.02.20 2.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	15	masukan	3	3	100	3	9	60

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) * 100}{100}$	9	$10 = 9 + 7$	$11 = \frac{(10/4) * 100}{100}$
		(semua perencanaan pembangunan daerah)								
5.01.02.20 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	100	persen	100	100	100	100	100	100
5.01.02.20 3.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	10	laporan	2	2	100	2	6	60
5.01.02.20 3.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah	20	laporan	4	4	100	4	12	60
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	98.82	persen	97.05	96.13	99.05	96.46	87.8	89

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(7/6)*100</b>	<b>9</b>	<b>10=9+7</b>	<b>11=(10/4)*100</b>
		Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang ekonomi	98.37	persen	95.12	96.79	101.76	95.12	95.0	97
		Presentase keselarasan program renstra dengan RPJMD dan renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	98.25	persen	94.74	100.00	105.6	94.74	97.4	99
5.01.03.20 1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen renja, renstra, dan laporan kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	170	dokumen	34	34	100	34	102	60
5.01.03.20 1.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	140	dokumen	28	28	100	28	84	60

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) * 100}{100}$	9	$10 = 9 + 7$	$11 = \frac{(10/4) * 100}{100}$
5.01.03.20 1.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	30	dokumen	6	6	100	6	18	60
5.01.03.20 1.08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	20	laporan	4	4	100	4	12	60
5.01.03.20 2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen renja, renstra, dan laporan kinerja program bidang perekonomian dan SDA	30	dokumen	6	6	100	6	18	60
5.01.03.20 2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	20	dokumen	4	4	100	4	12	60

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} * 100$	9	$10 = 9 + 7$	$11 = \frac{10}{4} * 100$
	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	bidang perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)								
5.01.03.20 2.04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	15	laporan	3	3	100	3	9	60
5.01.03.20 2.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	10	dokumen	2	2	100	2	6	60
5.01.03.20 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen renja, renstra dan laporan kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan	30	dokumen	6	6	100	6	18	60

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} * 100$	9	$10 = 9 + 7$	$11 = \frac{10}{4} * 100$
5.01.03.20 3.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	10	dokumen	2	2	100	2	6	60
5.01.03.20 3.05	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	20	laporan	4	4	100	4	12	60
5.01.03.20 3.04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	20	dokumen	4	4	100	4	12	60
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah (Th 2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{(7/6) * 100}{100}$	9	$10 = 9 + 7$	$11 = \frac{(10/4) * 100}{100}$
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	40	persen	35.71	89.39	250.32	89.71	179,1	447.7
5.05.02.204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan invensi yang difasilitasi	350	inovasi	70	198	282.8	204	402	72.6
5.05.02.204.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1200	dokumen	297	370	124.58	315	685	57.08
5.05.02.204.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	10	Laporan	2	2	100	2	6	60

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2025, disimpulkan capaian kinerja target dan realisasi 4 (empat) Program pada Renja Tahun 2024, yaitu meliputi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dari keempat program kewenangan Bappelitbangda realisasi hampir seluruhnya mendekati/sesuai/melebihi target. Untuk mencapai kinerja program Bappelitbangda melaksanakan 15 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Dari 15 kegiatan terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yang pencapaiannya belum sesuai/jauh dari target. Kegiatan/sub kegiatan tersebut yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
2. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
3. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja merupakan proses penting dalam menentukan keberhasilan antara perencanaan yang diukur dari setiap sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Teknis pengukuran kinerja menggunakan format berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah disepakati, untuk mengevaluasi, mengukur dan menilai kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappelitbangda dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

**Tabel II. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2024**

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<b>Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas</b>	<b>Skor Perencanaan</b>	<b>Angka</b>	<b>23</b>	<b>22,84</b>	<b>99,30</b>
1.1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	Persen	97,50 %	98,73 %	101,26
1.2	Meningkatnya Peran Kelitbangan Dalam Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100 %	100 %	100
2	<b>Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda</b>	<b>Nilai Kematangan BAPPELITBANGDA</b>	<b>Angka</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>97,91</b>
2.1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Angka	78	76,36 %	97,89
	Rata-rata capaian kinerja					99,27

Pada tabel di atas terdapat 2 (dua) tujuan Strategi dengan 2 (dua) indikator kinerja dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Dari kelima indikator tersebut, 1 (satu) indikator telah melebihi target dengan capaian 101,26%, 1 (satu) indikator mencapai target (100%), dan 3 (tiga) indikator tercapai dengan rata-rata diatas 90%. Untuk rata-rata capaian kinerja Bappelitbangda dari 5 (lima) indikator kinerja mencapai 99,27 %.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2024 tergambar dari capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda tahun 2024. Penghitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

**Tabel II. 3 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Hingga akhir tahun 2024, BAPPELITBANGDA telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari Tabel II.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga di tahun 2024 menunjukkan rata – rata capaian kinerja sebesar 99,27 % atau kategori “**Sangat Tinggi**”. Adapun seluruh pencapaian kinerja Bappelitbangda dapat diuraikan, sebagai berikut :

**2.2.1 Tujuan 1 : Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas**

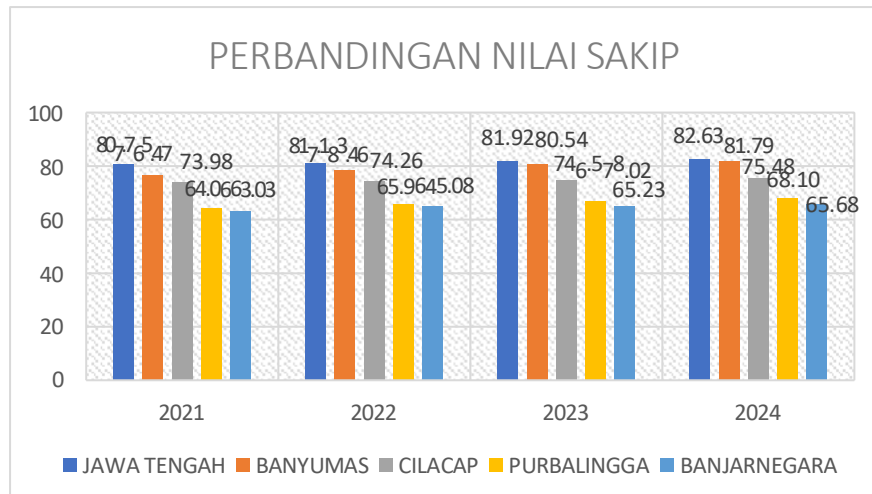
Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dapat dilihat dengan nilai AKIP komponen perencanaan karena nilai komponen perencanaan menunjukkan kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan kabupaten dan perangkat daerah. Nilai AKIP komponen perencanaan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada Tahun 2024 nilai AKIP komponen perencanaan dengan nilai 22,84, mengalami kenaikan 0,41 dari nilai tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 2,70 dan dapat dikatakan rata-rata kenaikan selama 5 (lima) tahun sebesar 0,54. Selengkapnya dibawah ini perbandingan komponen perencanaan AKIP sebagai tujuan kinerja Bappelitbangda tahun 2020 s.d 2024 sebagaimana pada tabel II.4 :

**Tabel II. 4 Perbandingan Komponen Perencanaan AKIP Tahun 2020 s.d 2024**

Komponen yang dinilai	Bobot	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra
Perencanaan Kinerja	30	20,14	21,14	21,86	22,43	23	22,84	25
Tingkat Kinerja	Akuntabilitas	B	B	B	B	B	B	

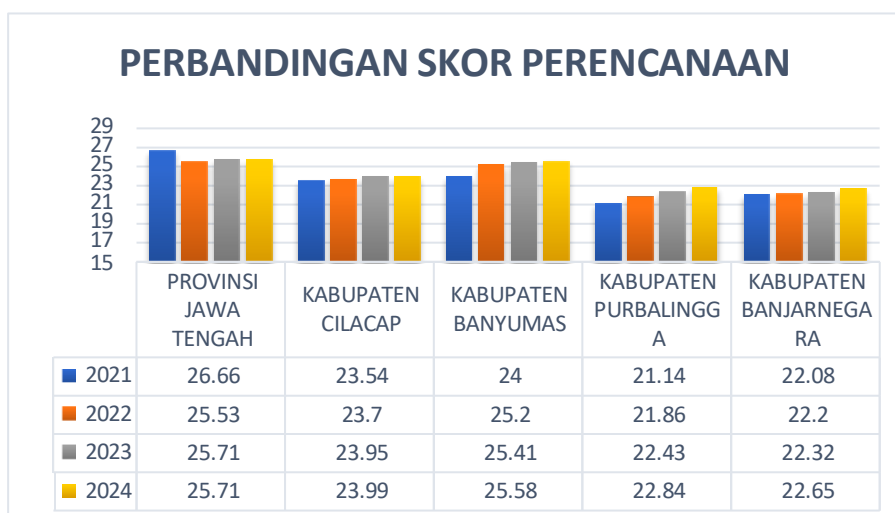
Nilai AKIP dan Komponen Perencanaan Kabupaten Purbalingga dibandingkan dengan kabupaten sekitar dan provinsi dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik II. 1 Perbandingan Nilai AKIP Tahun 2021 s.d 2024**



Nilai AKIP Kabupaten Purbalingga dari tahun 2021-2024 mengalami kenaikan cukup signifikan. Hal tersebut menggambarkan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dalam Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa, Kabupaten Purbalingga pencapaian target SAKIP dengan kenaikan mencapai 4,04 sejak tahun 2021. Pada Tahun 2024 Kabupaten Purbalingga lebih tinggi nilai AKIP sebesar 2,42 dari Kabupaten Banjarnegara dan berada dibawah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap. Untuk mencapai nilai AKIP tersebut terdapat komponen perencanaan yang menjadi salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga menjadikan komponen perencanaan sebagai kinerja utama perangkat daerah yang dapat menggambarkan kinerja perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2024 AKIP skor perencanaan jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 0,41 sedangkan 3 kabupaten lain dan provinsi hanya dengan kenaikan 0,00-0,33. Perbandingan Komponen Perencanaan dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik II. 2 Perbandingan Skor Perencanaan Tahun 2021 s.d 2024**



Dilihat dari progres kinerja komponen perencanaan pada evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengalami kenaikan dimana hal tersebut menggambarkan adanya tindak lanjut dari hasil rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya :

- a. Sebagian besar penyusunan pohon kinerja telah mempertimbangkan faktor kritis/Critical Success factor (CSF) dalam pencapaian kinerja, namun demikian alur dalam pohon kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan “jika-maka” atau “sebab-akibat” antar CSF.
- b. Masih ditemukan kinerja yang belum menggambarkan kondisi sehingga belum berorientasi hasil sesuai dengan tingkat pengampunya. Hal ini sebagian besar ditemukan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bidang beberapa PD, sehingga kontribusi kinerja yang dihasilkan pada tingkat tersebut belum diyakini mendukung kinerja di atasnya.
- c. Penyusunan pohon kinerja belum optimal dalam mengidentifikasi adanya kemungkinan *crosscutting* sebagai bentuk *sharing outcome* antar PD dalam mencapai kinerja utama PD.
- d. Kualitas rencana aksi yang telah disusun ditingkat PD, belum seluruhnya relevan dan mendukung terhadap pencapaian kinerja utama organisasi.

Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat 2 (dua) sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan, dan meningkatnya peran kelitbangan dalam

pembangunan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu

1. Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD
2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

### 2.2.1.1 Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD

Pencapaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan” dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 5 Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan Bappelitbangda Tahun 2024**

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2022 (%)	2023 (%)	TARGET 2024 (%)	REALISASI 2024 (%)	CAPAIAN 2024 (%)	TARGET RENSTRA (%)
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan						
	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD	97,52	98,50	98,50	98,73	110,95	99

Capaian indikator kinerja tingkat keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD sebesar 110,95% sesuai perbandingan realisasi dengan target indikator. dilihat pada tabel diatas realisasi tingkat keselarasan program RKPD dengan program RPJMD Tahun 2024 sebesar 98,73% telah melebihi target sebesar 0,23%. Realisasi tahun 2024 naik 1,21% dibandingkan dengan tahun 2022 yang menggambarkan peningkatan capaian kinerja perencanaan dari tahun ke tahun. Indikator kinerja tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dapat dilihat dari program, indikator dan target kinerja yang konsisten direncanakan pada tahun berkenaan (tahun 2025) yang pada khususnya proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 dengan melihat hasil fasilitasi Provinsi terkait konsistensi target program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dengan RPJMD periode 2025-2029 yang harus dilaksanakan pada Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah direvisi kedalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun 2025 telah disesuaikan dengan peraturan diatas dan sesuai dengan program RPJMD 2025-2029. Program RPJMD 2025-2029 sejumlah 134 dan program RKPD Tahun 2025 yang digunakan sejumlah 132. Berdasarkan perbedaan jumlah tersebut dikarenakan terdapat beberapa program RPJMD 2025-2029 yang tidak digunakan sehubungan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah akan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) dan pemenuhan target Standar pelayanan Minimal serta pencapaian sasaran pembangunan. Program RPJMD 2025-2029 yang tidak digunakan pada Program RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan merupakan program yang digunakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membiayai Penyediaan Profil Kependudukan. Untuk meningkatkan digitalisasi data termasuk profil kependudukan maka untuk mengefisien dan mengefektifkan kinerja publikasi profil kependudukan menggunakan website sehingga program ini tidak disediakan anggaran.

2. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini digunakan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi khususnya aset pemerintah daerah. Tahun 2024 terdapat kebijakan untuk fasilitasi sertifikasi aset pemerintah daerah ditangani oleh Badan Keuangan Daerah pada Bidang Aset Daerah.

Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 6 Rekapitulasi Konsistensi Jumlah dan Nomenklatur Program RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029

Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	SELURUH OPD	1	1	0/6	6/0	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	Pendidikan	DINDIKBUD	2	2	0/5	5/0	
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN	4	4	0/8	8/0	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU - PR	6	6	0/7	7/0	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINRUMKIM	5	4	0/5	4/1	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP, BPBD	3	3	0/4	4/0	
6	Sosial	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/5	5/0	
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK						

Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
7	Tenaga Kerja	DINNAKER	4	4	0/4	4/0	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSDALDUKKBP3A	5	5	0/7	7/0	
9	Pangan	DKPP	4	4	0/4	4/0	
10	Pertanahan	DINRUMKIM	3	3	0/3	3/0	
11	Lingkungan Hidup	DLH	9	9	0/9	9/0	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL	4	3	0/7	6/1	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINPERMASDES	4	4	0/4	4/0	
14	Pengendalian Penduduk dan KB	DINSOSDALDUKKBP3A	3	3	0/5	5/0	
15	Perhubungan	DINHUB	1	1	0/2	2/0	
16	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO	2	2	0/2	2/0	
17	Koperasi dan UKM	DINKOP UKM	6	6	0/6	6/0	
18	Penanaman Modal	DPMPPT SP	5	5	0/5	5/0	
19	Kepemudaan dan Olahraga	DINPORAPAR	3	3	0/3	3/0	

Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Statistik	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
21	Persandian	DINKOMINFO	1	1	0/1	1/0	
22	Kebudayaan	DINDIKBUD	4	4	0/4	4/0	
23	Perpustakaan	DINARSPUS	2	2	0/2	2/0	
24	Kearsipan	DINARSPUS	2	2	0/2	2/0	
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
25	Kelautan dan Perikanan	DKPP	3	3	0/3	3/0	
26	Pariwisata	DINPORAPAR	3	3	0/3	3/0	
27	Pertanian	DINAS PERTANIAN	5	5	0/6	6/0	
28	Perdagangan	DINPERINDAG	5	5	0/5	5/0	
29	Perindustrian	DINPERINDAG	3	3	0/3	3/0	
30	Transmigrasi	DINNAKER	1	1	0/1	1/0	
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
31	Sekretariat Daerah	SETDA	3	3	0/10	10/0	
32	Sekretariat DPRD	SETWAN	1	1	0/3	3/0	

Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
33	Perencanaan	BAPPELITBANGDA	2	2	0/6	6/0	
34	Keuangan	BAKEUDA	3	3	0/6	6/0	
35	Kepegawaian	BKPPD	1	1	0/4	4/0	
36	Pendidikan dan Pelatihan	BKPPD	1	1	0/1	1/0	
37	Penelitian dan Pengembangan	BAPPELITBANGDA	1	1	0/1	1/0	
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
38	Inspektorat	INSPEKTORAT	2	2	0/3	3/0	
VII	UNSUR KEWILAYAHAN						
39	Kecamatan	KECAMATAN	5	5	0/5	5/0	
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	KESBANGPOL	5	5	0/5	5/0	
JUMLAH			135	133	174	172/2	

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran perencanaan yang pertama yaitu dari hasil perhitungan jumlah program, indikator, dan target RKPD sebanyak 133 program, 172 indikator, dan 172 target terhadap jumlah program, indikator, target RPJMD sebanyak 135 program, 174 indikator, 174 target. Meskipun capaian kinerja keselarasan dokumen perencanaan mengalami peningkatan, masih terdapat beberapa kendala/hambatan dalam pencapaiannya :

1. Koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Ketersediaan data dan informasi masih terbatas sehingga perlu perhatian/upaya keras dalam pencapaian target kinerja OPD;
3. Capaian kinerja OPD masih belum optimal karena kurangnya pendalaman terhadap evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan pencapaian kinerja.
4. Penyesuaian indikator baru di beberapa perangkat daerah hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang telah dilakukan antara lain :

1. Mendampingi OPD dalam penyusunan cascading sebagai acuan perjanjian kinerja OPD.
2. Mengupdate dan memfasilitasi penyediaan data perencanaan dengan memberikan anggaran program/kegiatan untuk seluruh OPD dalam mencapai indikator kinerja OPD.
3. Memaksimalkan rencana kegiatan bagi OPD sesuai dengan tujuan sasaran OPD.
4. Rutin melakukan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan dan tingkat ketercapaiannya.

#### **2.2.1.2 Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan**

sasaran kedua yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan. Sasaran tersebut ditandai dengan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Capaian indikator kinerja sasaran kedua sebesar 100% berdasarkan perbandingan jumlah inovasi dan invensi yang diterapkan tahun 2024 sejumlah 8 inovasi dan invensi dengan jumlah inovasi dan invensi yang didesiminasikan sejumlah 8 inovasi dan invensi. Pencapaian kinerja sasaran urusan kelitbangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 7 Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Litbang Bappelitbangda Tahun 2024**

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2022	2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	TARGET RENSTRA
1	Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan						
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	99,43	100	100	100	100	100

Melihat tabel diatas pencapaian indikator urusan kelitbangan pada tahun 2024 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Realisasi kinerja tahun 2024 naik 0,57% dibandingkan tahun 2022. Capaian kinerja tahun ini diharapkan dapat tercapai pula pada akhir target renstra.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur – unsur kelembangaan, sumber daya, keseluruhan yang utuh dilingkungan Nasional Republik Indonesia.

Pada tanggal 9-11 Juli 2024 tahun 2024 Kabupaten Purbalingga mengirimkan perwakilan dalam Kegiatan Pameran Produk Inovasi (PPI) Se-Jawa Tengah bertempat di Alun – Alun Kabupaten Cilacap yang diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai bentuk kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian peran kelitbangan dalam Pembangunan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengenalan, pemahaman, sosialisasi, dan promosi kepada masyarakat luas terkait Inovasi Daerah yang terdapat di Kabupaten Purbalingga. PPI merupakan ajang untuk menyebarkan informasi dan mempromosikan produk inovasi teknologi. Acara ini bertujuan untuk mendorong inovasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Inovasi Daerah merupakan salah satu bagian kegiatan Diseminasi hasil-hasil kelitbangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam menggali inovasi dan invensi masyarakat, Bappelitbangda telah menyelenggarakan kegiatan Lomba Kreasi dan Inovasi sebagai wadah ajang kreasi dan inovasi masyarakat yang merupakan kegiatan untuk mendukung agenda kebijakan inovasi untuk membangun budaya inovasi dan sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil pengembangan masyarakat.

Kabupaten Purbalingga telah mengikuti kegiatan kelitbangan seperti kreatifitas dan inovasi ditingkat Provinsi Jawa Tengah dan pemanfaatan dijadikan sebagai bagian hasil kelitbangan. Beberapa temuan perekayasa inovasi yang diterapkan dan difasilitasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

**Tabel II. 8 Penerapan dan Fasilitasi Kelanjutan Inventor Purbalingga Tahun 2015-2023**

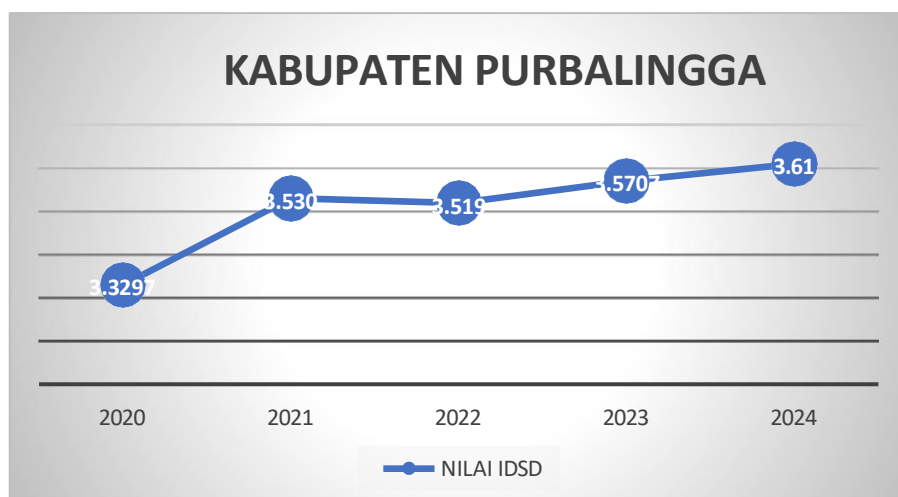
Tahun Perolehan Nominator Krenova	Judul	Nama Inventor	Tindak Lanjut
2015	Budidaya ayam organik Jawa Super	Parwoto / Purwanto	-
2016	Teleskop Batu Akik (TELESKIK)	Anjat Saputra	-
2017	Berantas Sampahnya Manfaatkan Limbahnya	1. Dian Sulistiono 2. Hartoyo Karsin 3. Dewi 4. Upit Haryanto 5. Rahmat Hidayat	Fasilitasi Hak Paten
2018	- Pengembangan Pemijahan Gurame Metode Kolam Terpal Air Dangkal	1. Marbowo Laksono 2. Mohaman Soimun	- Fasilitasi HAKI - Pengembangan melalui DPA DKPP
	- ANDROSIP (Aplikasi Android Keluarga ASIP) Media Edukasi untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya ASI Kepada Pekerja Perempuan Purbalingga	1. Yusron Mubarak 2. Cich Nurkaeti 3. Amelia Fauzana	
2020	- Gamified Massive Open Online Cours Platform ( Platform Pembelajaran Daring Terbuka Berbasis Gamifikasi)	1. Soleh Nur Hayat 2. Rujianto Eko Saputro	
	- Monitoring and Control Traffic System (Sistem Monitoring dan Kontrol Lampu Lalu Lintas)	Singgih Ardiansyah	Fasilitasi HAKI
2021	- Limbah Pustaka	RR Hendarti, S.Sos	Pelatihan Printing Cap bahan Limbah Kertas
2022	- Pemanfaatan Milimas (Minyak Limbah Masker) sebagai	Krishna Adhie Christan	Fasilitasi Hak Cipta/Merk di tingkat Provinsi

Tahun Perolehan Nominator Krenova	Judul	Nama Inventor	Tindak Lanjut
	Alternatif Bahan Bakar Minyak		Jawa Tengah
2023	- Konversi Sepeda Motor BBM menjadi Sepeda Motor Listrik Bralink EV 1 dan Bralink EV 2	IKM Purbalingga kolaborasi SMK YPT 2 dan SMK Negeri 1 Kaligondang	Fasilitasi Pengembangan dan Legalitas

Sumber : Bappelitbangda Kab. Purbalingga, 2024

Dalam meningkatkan peran penelitian dan pengembangan dalam pembangunan tidak hanya kontribusi inovasi dan invensi yang mempengaruhi kinerja tersebut. Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan Pengukuran IDSD sebagai tindak lanjut Indeks Daya Saing daerah (IDSD). Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Penyusunan IDSD 2023 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standarisasi data, pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan agregasi. Pengukuran IDSD 2024 ini mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Purbalingga tahun 2020 s/d 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik II. 3 Pencapaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 s.d 2024**



Sumber : Bappelitbangda Kab. Purbalingga, 2025

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran pada tahun 2024 adalah

1. Ketersediaan sumberdaya terbatas (kelembagaan (setara es IV), manusia, modal, sarana dan fasilitas, prasarana dan informasi).
2. Secara Nasional, Pola manajerial kelembagaan litbang cenderung struktural, belum terbangunnya mekanisme intermediasi yang berpeluang mempersambungkan kapasitas iptek dengan kebutuhan (need) industri dan dunia usaha, serta belum tegas dan operasionalnya bentuk intervensi pemerintah dalam mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya industri berbasis litbang maupun penguatan kapasitas iptek nasional
3. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan pembangunan daerah
4. Belum disusunnya grand design kelitbang sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan berbasis litbang.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Litbang
2. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (Ijin Penelitian/KKN).
3. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga kelitbang guna meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah.
4. Mempertemukan individu/Lembaga Penemu/penghasil inovasi di satu sisi dengan Dunia Usaha/Masyarakat selaku Penggunaanya.
5. Penyelenggaraan Lomba Krenova dan Diseminasi hasil kelitbang sebagai agenda kebijakan kelitbang.
6. Pertemuan pemenuhan data daya saing daerah.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Tujuan 1 Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dengan dukung 2 sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

### 2.2.2 Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda

Menindaklanjuti pasal 8 huruf c Permendagri nomor 99 Tahun 2018, disebutkan bahwa Pembinaan Penataan Perangkat Daerah dilakukan dengan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi 11 variabel. Penilaian kematangan organisasi perangkat daerah dilakukan setiap tahun didasarkan pada data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi. Data dan informasi yang dikumpulkan dapat berupa dokumen kebijakan (perda, perkara, keputusan kepala perangkat daerah), dokumen pelaksanaan tugas dan fungsi (laporan, hasil evaluasi, rekomendasi, dll), atau data dan informasi berupa hasil observasi dan wawancara. Setiap data dan informasi yang diperoleh harus dicatat sesuai dengan indikator yang akan diukur.

Sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi tim evaluator Kemenpan RB Bappelitbangda menambahkan tujuan “meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda” dengan indikator Tingkat Kematangan Bappelitbangda. Berdasarkan penilaian kematangan perangkat daerah yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purbalingga tahun 2024 Bappelitbangda mendapatkan nilai **47 (empat puluh tujuh)** dari data dukung yang telah dipenuhi sebagai indikator evaluasi kematangan. Nilai kematangan tahun 2024 naik 2 point dibandingkan tahun 2021, hanya saja menurun dari tahun 2023 1 point. Adapun capaian tingkat kematangan Bappelitbangda tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II. 9 Pencapaian Kinerja Tujuan Urusan Penunjang Bappelitbangda Tahun 2024**

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda							
	Tingkat Kematangan Bappelitbangda	45	45	48	49	47	95,91 %	NA

**Tabel II. 10 Nilai Komponen Tingkat Kematangan Bappelitbangda**

No	Komponen	Nilai 2024
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5
2	MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH	5
3	PENJAMINAN MUTU LAYANAN PERANGKAT DAERAH	3
4	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	3
5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR	5
6	ANALISIS KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH TUGAS PERANGKAT DAERAH	5
7	MANAJEMEN SUMBER DAYA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA YANG TERUKUR	5
8	MANAJEMEN RESIKO PELAKSANAAN TUGAS APARATUR	4
9	PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DAN APARATUR	5
10	PENGEMBANGAN INOVASI LAYANAN PERANGKAT DAERAH	4
11	BUDAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	3
Nilai Kematangan Perangkat Daerah		47

### 2.2.2.1 Meningkatkan Implementasi SAKIP Bappelitbangda

Sasaran pertama pada urusan perencanaan khususnya untuk meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda yaitu Nilai SAKIP Bappelitbangda. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Berdasarkan penilaian SAKIP dari Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, bahwa hasil atas Evaluasi

SAKIP pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mendapatkan nilai 76,36 atau predikat “BB” dengan interpretasi sangat baik, yang berarti bahwa Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kerjanya sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. Nilai AKIP Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai AKIP pada tahun 2023. Capaian nilai ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2024. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga. Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :

**Tabel II. 11 Nilai Setiap Komponen SAKIP Bappelitbangda Tahun 2023 dan 2024**

No	Komponen	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	25,20	24,00
2	Pengukuran Kinerja	21,60	21,60
3	Pelaporan Kinerja	12,00	12,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,50	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja		76,31	76,36

**Tabel II. 12 Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Penunjang Bappelitbangda Tahun 2024**

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2022	2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda						
	Nilai SAKIP Bappelitbangda	75,26	76,31	78,00	76,36	97,90 %	82

Dengan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya Implementasi SAKIP Bappelitbangda diatas, masih terdapat kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran pada tahun 2024 adalah

1. Kurang optimalnya pemanfaatan aplikasi e-kinerja sebagai alat bantu dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam menilai kinerja bawahan/ monitoring kinerja individu terhadap pencapaian kinerja organisasi.

2. Monitoring dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan, namun masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
3. Belum sepenuhnya kinerja individu mendukung kinerja organisasi, laporan kinerja masih bersifat administratif.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain :

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan kinerja bawahan.
2. Memaksimalkan forum evaluasi internal sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja.
3. Meningkatkan kompetensi SDM dalam peningkatan pencapaian kinerja.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan Tujuan 2 Meningkatnya kualitas kelembagaan Bappelitbangda dengan dukungan 1 sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah

Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

**Tabel II. 13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga**

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Bappelitbangda				Realisasi Capaian Renstra Bappelitbangda		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tujuan I: Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas											
1	Skor komponen perencanaan dalam penilaian SAKIP	-	-	22	23	24	25	22,43	22,84	24	25	
	Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bappelitbangda											
1.1	Nilai SAKIP Bappelitbangda	-	-	75	78	80	82	76,31	76,36	80	82	
	Program 1: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											
1.1.1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.2	Prosetase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.3	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.4	Presentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.5	Persentase pengadaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	
1.1.6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Bappelitbangda				Realisasi Capaian Renstra Bappelitbangda		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sasaran 2. Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan											
1.2	Tingkat keselarasan program RKPD dengan RPJMD (selarasnya program, indikator program dan target)	-	-	97	98	99	100	98,50	98,74	99	100	
	Program 2: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											
1.2.1	Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan	-	-	100	100	100	100	87,5	100	100	100	
1.2.2	Tingkat keterisian data IKK, SDGs, indikator program	-	-	81,7	82,3	83,6	84,2	82,98	83,4	83,6	84,2	
1.2.3	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Program 3: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											
2.3.1	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPd bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	-	-	97,05	97,69	97,64	98,23	96,13	100	97,64	98,23	
2.3.2	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPd bidang Ekonomi	-	-	95,12	97,50	95,12	96,75	96,79	100	95,12	96,75	

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Bappelitbangda				Realisasi Capaian Renstra Bappelitbangda		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.3	Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD, dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	-	-	94,74	100	94,74	96,49	100	100	94,74	96,49	
Sasaran 3. Meningkatnya Peran Kelitbangan dalam Pembangunan												
1.3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	-	76	100	100	100	103,38	100	100	100	
Program 4: PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
1.4.1	Cakupan inovasi dan invensi yang didesiminasikan	-	-	35,71	100	100	100	89,39	100	100	100	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga, bahwa tugas Bappelitbangda adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku koordinator perencanaan pembangunan dalam melaksanakan amanat peraturan perundangan dimaksud agar dapat terselenggara secara optimal, maka dalam penyusunan Rencana Kerja perlu direncanakan secara matang.

Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda, antara lain:

1. Faktor social dan politik (konflik kepentingan berbagai pihak, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan terbatasnya infrastruktur yang memadai serta teknologi dan inovasi yang belum optimal diterapkan;
2. Keterbatasan anggaran serta masih tingginya ketergantungan pada pusat dan kurangnya investasi dari sector swasta serta terbatasnya sumber daya manusia (SDM) perencana baik kuantitas maupun kualitas;
3. Masih kurangnya Ketersediaan data yang berkualitas (valid dan realible serta dapat dipertanggungjawabkan), juga belum sepenuhnya berbasis spasial dan Pemanfaatan teknologi informasi juga belum maksimal.
4. Dinamika kebijakan regulasi yang begitu cepat, tumpang tindih dan sering berubah;
5. Belum ada SDM kelitbangan, infrastruktur kelitbangan yang terbatas, dan kolaborasi berbagai pihak (pemerintah daerah, swasta, universitas, dan Lembaga peneliti) kurang terjalin dengan baik untuk mendorong inovasi dalam Pembangunan daerah.

Tantangan yang dihadapi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Rekomendasi Kemenpan RB terkait nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dalam perencanaan kinerja bahwa :
  - a. Sebagian besar penyusunan pohon kinerja telah mempertimbangkan factor kritis / *Critical Succes Factor* (CSF) dalam pencapaian kinerja, namun demikian alur dalam pohon kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hubungan “jika-maka” atau “sebab-akibat” antar CSF, sehingga masih ditemukan logika yang terbalik antar CSF. Dengan demikian pohon kinerja belum sepenuhnya logis dalam mencapai kinerja yang ditetapkan.
  - b. Masih ditemukan kinerja yang belum menggambarkan kondisi sehingga belum berorientasi hasil sesuai dengan tingkat pengampunya. Hal ini Sebagian besar ditemukan pada Perjanjian Kinerja Kepala Bidang beberapa PD, sehingga kontribusi kinerja / kondisi yang dihasilkan pada tingkat tersebut belum dapat diyakini mendukung kinerja di atasnya.
  - c. Penyusunan Pohon kinerja belum optimal dalam mengidentifikasi adanya kemungkinan *crosscutting* sebagai bentuk *sharing outcome* antar PD dalam mencapai kinerja utama PD.
  - d. Kualitas rencana aksi yang telah disusun di tingkat PD, belum seluruhnya relevan dan mendukung terhadap pencapaian kinerja utama organisasi.
2. Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah.

Dari permasalahan dan tantangan yang dihadapi dapat disimpulkan bahwa isu strategis bappelitbangda sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis Holistik, Integratif, Tematik, Spasial dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom up, top down, dan politis;
2. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif dan efisien;
3. Peningkatan data yang berkualitas dan berbasis spasial serta pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sistem informasi Perencanaan lainnya (e-data, ebudgeting, e-monev dan e-reporting);
4. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Purbalingga terkait Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Membangun Kerjasama dengan berbagai pihak dalam Pembangunan yang Kolaboratif berbasis inovasi dan teknologi guna meningkatkan pelayanan publik.

Dalam menjawab isu-isu strategis Bappelitbangda, upaya yang akan dilakukan antara lain :

1. Memaksimalkan hasil Penyelenggaraan Forum Perencanaan (MusrenbangCam, Forum OPD, dan MusrenbangKab) sebagai sarana/tempat dalam penyepakatan program/kegiatan yang berasal dari masyarakat/aspirasi (bottom-up).
2. Pengintegrasian pemanfaatan teknologi informasi pada sistem perencanaan pembangunan (SIPD-RI) dengan aplikasi evaluasi kinerja.
3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas (Bimtek) Implementasi Regulasi dan Kebijakan bagi ASN Bappelitbangda guna penguatan kompetensi dan penyediaan sarana prasarana serta penerapan standar dan prosedur kerja.
4. Penyusunan peta jalan kelitbang dan penerapan kelitbang sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan berbasis litbang.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 14 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Purbalingga

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
PERENCANAAN						PERENCANAAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	BAPPELIT BANGDA	100	persen	5.571.133.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	BAPPELIT BANGDA	100	persen	5.358.915.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	110.656.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	BAPPELIT BANGDA	100	persen	110.656.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPELIT BANGDA	2	dokumen	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPELIT BANGDA	2	dokumen	4.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPELIT BANGDA	6	Laporan	106.656.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPELIT BANGDA	6	Laporan	106.656.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan perangkat daerah	BAPPELIT BANGDA	100	Persen	4.648.684.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	BAPPELIT BANGDA	100	Persen	4.436.466.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPELIT BANGDA	31	Orang/bulan	4.499.484.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPELIT BANGDA	31	Orang/bulan	4.287.266.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPELIT BANGDA	121	dokumen	102.880.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPELIT BANGDA	121	dokumen	102.880.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPPELIT BANGDA	600	dokumen	46.320.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPPELIT BANGDA	600	dokumen	46.320.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Laporan BMD yang di serahkan tepat waktu sesuai ketentuan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	3.900.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	3.900.000	
Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPELIT BANGDA	4	laporan	3.900.000	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPELIT BANGDA	4	laporan	3.900.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	BAPPELIT BANGDA	44	orang	60.880.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	60.880.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPPELIT BANGDA	11	orang	15.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPPELIT BANGDA	4	orang	15.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPELIT BANGDA	44	orang	45.880.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPELIT BANGDA	31	orang	45.880.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	BAPPELIT BANGDA	12	bulan	56.858.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	BAPPELIT BANGDA	100	persen	56.858.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPPELIT BANGDA	10	paket	8.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPPELIT BANGDA	10	paket	8.800.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BAPPELIT BANGDA	10	paket	16.221.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BAPPELIT BANGDA	10	paket	16.221.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BAPPELIT BANGDA	12	dokumen	1.140.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	BAPPELIT BANGDA	12	dokumen	1.140.000	
Penyediaan Fasilitas Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	BAPPELIT BANGDA	12	laporan	5.000.000	Penyediaan Fasilitas Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	BAPPELIT BANGDA	12	laporan	5.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPELIT BANGDA	12	laporan	11.297.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPELIT BANGDA	12	laporan	11.297.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BAPPELIT BANGDA	12	dokumen	14.400.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BAPPELIT BANGDA	12	dokumen	14.400.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	BAPPELIT BANGDA	-	buah	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	BAPPELIT BANGDA	-	persen	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	BAPPELIT BANGDA	-	unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	BAPPELIT BANGDA	-	unit	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPPELIT BANGDA	-	unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPPELIT BANGDA	-	unit	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPPELIT BANGDA	12	bulan	405.988.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	BAPPELIT BANGDA	100	persen	405.988.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPPELIT BANGDA	12	laporan	300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPPELIT BANGDA	12	laporan	300.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPPELIT BANGDA	12	laporan	70.640.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPPELIT BANGDA	12	laporan	70.640.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPPELIT BANGDA	2	laporan	10.622.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPPELIT BANGDA	2	laporan	10.622.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPPELIT BANGDA	14	laporan	324.426.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPPELIT BANGDA	14	laporan	324.426.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	BAPPELIT BANGDA	12	bulan	284.167.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	BAPPELIT BANGDA	100	persen	284.167.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPPELIT BANGDA	29	unit	251.167.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPPELIT BANGDA	29	unit	251.167.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPPELIT BANGDA	15	unit	13.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPPELIT BANGDA	15	unit	13.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPPELIT BANGDA	1	unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	BAPPELIT BANGDA	1	unit	20.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat Keterisian Data Pembangunan (SDI Bappenas) - Persentase Pencapaian Target Kinerja Program Pembangunan	BAPPELIT BANGDA	100 84 94,07	persen persen persen	367.977.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat Keterisian Data Pembangunan (SDI Bappenas) - Persentase Pencapaian Target Kinerja Program Pembangunan	BAPPELIT BANGDA	100 85 94,07	persen persen persen	367.977.000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	303.417.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	303.417.000	
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELIT BANGDA	45	dokumen	32.515.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELIT BANGDA	2	dokumen	32.515.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPELIT BANGDA	24	berita acara	123.350.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPELIT BANGDA	1	berita acara	123.350.000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	BAPPELIT BANGDA	5	dokumen	147.552.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	BAPPELIT BANGDA	2	dokumen	147.552.000	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	33.662.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	33.662.000	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	BAPPELIT BANGDA	1	dokumen	33.662.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	BAPPELIT BANGDA	3	dokumen	33.662.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase dokumen evaluasi OPD yang disusun	BAPPELIT BANGDA	100	persen	30.898.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	30.898.000	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	BAPPELIT BANGDA	2	laporan	12.193.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	BAPPELIT BANGDA	5	laporan	12.193.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BAPPELIT BANGDA	4	laporan	18.705.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BAPPELIT BANGDA	4	laporan	18.705.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase	BAPPELIT BANGDA	100 100 100	persen persen persen	399.778.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase keselarasan Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase keselarasan Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD	BAPPELIT BANGDA	100 100 100	persen persen persen	399.778.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang Ekonomi - Persentase keselarasan program Renstra dengan RPJMD dan program Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah						bidang Ekonomi - Persentase keselarasan Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah					
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPELIT BANGDA	34	dokumen	169.511.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	169.511.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELIT BANGDA	5	dokumen	29.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELIT BANGDA	5	dokumen	29.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	BAPPELIT BANGDA	28	laporan	55.781.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	BAPPELIT BANGDA	28	laporan	55.781.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELIT BANGDA	5	dokumen	30.681.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELIT BANGDA	5	dokumen	30.681.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	BAPPELIT BANGDA	6	laporan	54.049.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	BAPPELIT BANGDA	6	laporan	54.049.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Perekonomian dan SDA	BAPPELIT BANGDA	5	dokumen	102.448.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Ekonomi yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	102.448.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELIT BANGDA	6	dokumen	24.889.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELIT BANGDA	1	dokumen	24.889.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	BAPPELIT BANGDA	4	laporan	46.874.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	BAPPELIT BANGDA	4	laporan	46.874.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	BAPPELIT BANGDA	2	dokumen	30.685.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	BAPPELIT BANGDA	2	laporan	30.685.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPELIT BANGDA	6	dokumen	127.819.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	127.819.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELIT BANGDA	5	dokumen	60.991.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELIT BANGDA	1	dokumen	60.991.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		2	laporan	33.673.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		2	laporan	33.673.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	BAPPELIT BANGDA	3	dokumen	33.155.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	BAPPELIT BANGDA	3	dokumen	33.155.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Daerah Bidang Kewilayahan						Daerah Bidang Kewilayahan						
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BAPPELIT BANGDA				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		BAPPELIT BANGDA				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	980.913.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	156.758.000	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Invensi yang di Fasilitas	BAPPELIT BANGDA	70	inovasi	156.758.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan invensi yang didesiminasikan	BAPPELIT BANGDA	100	persen	156.758.000	
Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		321	dokumen	55.322.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		2	dokumen	55.322.000	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BAPPELIT BANGDA	2	laporan	101.436.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BAPPELIT BANGDA	4	laporan	101.436.000	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Hasil Riset dan Inovasi Daerah	BAPPELIT BANGDA	100	persen	170.000.000	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah	BAPPELIT BANGDA	100	persen	170.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Cat. Penting
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan yang difasilitasi	BAPPELIT BANGDA	70	inovasi	170.000.000	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase hasil riset dan inovasi daerah yang difasilitasi	BAPPELIT BANGDA	100	persen	170.000.000	
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	BAPPELIT BANGDA	2	laporan	170.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	BAPPELIT BANGDA	1	laporan	170.000.000	
					6.665.646.000						6.453.428.000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga melalui aplikasi SIPD-RI.

**Tabel II. 15 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Purbalingga**

No.	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-
NIHIL					
-	-	-	-	-	-

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan Visi Misi RPJMD Kabupaten Purbalingga 2025-2029.

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, sebagai berikut :

**Tabel III. 1 Tema Pembangunan dan Prioritas Nasional Tahun 2026**

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2026 : Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif	
PRIORITAS NASIONAL	
PRIORITAS 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
PRIORITAS 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
PRIORITAS 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
PRIORITAS 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
PRIORITAS 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
PRIORITAS 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
PRIORITAS 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

PRIORITAS 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
-------------	---

Adapun kebijakan provinsi berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 2 Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026**

TEMA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026 :	
Penguatan perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang dinamis	
PRIORITAS DAERAH	
PRIORITAS 1	Penguatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infratraktur yang merata dan berkualitas
PRIORITAS 2	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata
PRIORITAS 3	Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup
PRIORITAS 4	Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam Renja 2026, Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga melakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional dan daerah untuk memastikan adanya keselarasan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan. Penelaahan ini memperhatikan dengan seksama Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang berfokus pada Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif serta delapan prioritas nasional yang ditetapkan. Kebijakan nasional ini mencakup berbagai aspek strategis seperti penguatan ideologi, kemandirian bangsa, pengembangan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi industri, pembangunan dari desa, reformasi politik, serta penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan. Bappelitbangda harus memastikan bahwa tujuan dan sasaran dalam Renja 2026 selaras dengan arah kebijakan nasional ini, sehingga program dan kegiatan yang dirancang dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Selain itu, Bappelitbangda juga harus memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, yaitu " Penguatan perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, ketahanan sumber daya alam dan

lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang dinamis". Delapan prioritas daerah yang meliputi penguatan daya saing perekonomian dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan, infrastruktur yang merata dan berkualitas, penguatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif harus diintegrasikan ke dalam tujuan dan sasaran Renja 2026. Dengan melakukan penelaahan yang komprehensif terhadap kebijakan nasional dan daerah, Bappelitbangda dapat memastikan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan tidak hanya selaras tetapi juga sinergis, sehingga mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari delapan prioritas nasional dan empat prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah dukungan Bappelitbangda khususnya mengutamakan pada Prioritas Nasional ke 7 yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan" dan Prioritas Daerah Provinsi ke 4 yaitu "Penguatan tata kelola pemerintahan dinamis yang lebih adaptif dan kolaboratif" melalui koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan akan menjadi kunci dalam mencapai keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Bappelitbangda dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi tahun 2026 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang juga merupakan penjabaran dari RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berperan penting dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, tetapi juga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan lokal secara efektif. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda mengutamakan pendekatan yang integratif, dengan melakukan sinkronisasi antara berbagai program dan kegiatan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Upaya ini mencakup penyelarasan kebijakan, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen RKPD, serta memastikan bahwa

semua rencana tersebut mendukung visi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD. Bappelitbangda juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, melalui forum-forum partisipatif seperti musrenbang dan konsultasi publik, sehingga setiap keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, Renja Bappelitbangda tidak hanya menjadi alat koordinasi antar-level pemerintahan, tetapi juga memastikan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu menjadi "*think thank*" dan "*engine of tomorrow*" di bidang perencanaan dan Penelitian-Pengembangan daerah, maka Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Purbalingga 2025-2029 adalah :

#### **"AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA"**

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

- a. Bangkitkan Ekonomi Rakyat;
- b. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan;
- c. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;

d. Unggulkan Kualitas SDM.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tersebut, Bappelitbangda sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan litbang, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Purbalingga selama lima tahun ke depan khususnya pada misi ke 3 yaitu “Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Inovatif, dan Agile dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan sasaran yang berkait adalah Meningkatnya birokrasi yang inovatif, prima dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan dengan indikator Nilai SAKIP.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, Bappelitbangda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan / kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah merancang keseluruhan proses pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah secara berkesinambungan (*sustainable*) dan terus menerus seiring adanya tuntunan pembangunan.

Tujuan jangka menengah yang harus dicapai oleh Bappelitbangda dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama dalam pencapaian misi pertama, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda sebagai perangkat daerah perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*). Untuk Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan daerah ditandai dengan meningkatnya Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional di Daerah.

Dalam mencapai keberhasilan tujuan jangka menengah Bappelitbangda periode 2025-2029 didukung oleh 2 (dua) sasaran strategi Bappelitbangda yaitu:

- 1) Mewujudkan Keselarasan Program dalam RKPD dengan RPJMD  
Keselarasan dokumen perencanaan ditandai dengan tingkat keselarasan Program RKPD dengan RPJMD. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD.
- 2) Meningkatkan kualitas pengendalian kinerja pembangunan daerah  
Pengendalian kinerja pembangunan daerah dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan perencanaan agar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengendalian kinerja menjadi lebih preventif, adaptif dan strategis apabila didasarkan pada manajemen risiko untuk mencegah/ mengurangi penyimpangan kinerja dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
- 3) Meningkatkan budaya riset dan inovasi dalam pembangunan  
Dalam menciptakan kinerja pemerintahan yang baik (*good governance*) keberadaan litbang dalam susunan organisasi pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis, sebagai "*think tank*" harus mampu menjawab permasalahan dan memberikan solusi yang konkrit bagi pembangunan daerah. Untuk menciptakan kinerja perencanaan berbasis riset dapat dilihat dengan meningkatnya budaya riset dan inovasi dalam pembangunan
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda  
Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda ditandai dengan meningkatnya nilai Sakip Bappelitbangda. Penilaian Sakip Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai Tim Penilai Sakip di Tingkat Kabupaten. Sakip mempunyai peran strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan.

Tujuan dan Sasaran serta indikator target Bappelitbangda tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 3 Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan daerah	74,35	ANGKA
	Mewujudkan Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	Tingkat Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	100	PERSEN
	Meningkatnya kualitas pengendalian kinerja pembangunan daerah	MRI	2,998	ANGKA
	Meningkatnya budaya riset dan inovasi dalam pembangunan	Kapabilitas Inovasi	2,56	ANGKA
	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai SAKIP Bappelitbangda	77,16	ANGKA

### 3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai visi, misi, dan prioritas daerah, program dan kegiatan merupakan cara atau jalan yang ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan dalam dokumen strategis seperti RPJMD atau Renstra. Program adalah penjabaran kebijakan daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kemudian dijabarkan dalam Kegiatan sebagai rincian dari program yang menggambarkan rangkaian tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai target hasil dari program, serta menjadi dasar penganggaran dalam APBD. Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 yang merupakan dasar klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah terdapat istilah baru yaitu sub-kegiatan yang merupakan rincian dari kegiatan yang menjadi unit terkecil pelaksanaan anggaran dan menjadi dasar penarikan dana. Program, Kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III. 4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2026**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN				
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	persen	5.358.915.000
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	100	persen	110.656.000
5.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	4.000.000
5.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	106.656.000
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	100	Persen	4.436.466.000
5.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	Orang/bulan	4.287.266.000
5.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121	dokumen	102.880.000
5.01.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	600	dokumen	46.320.000
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan daerah	100	persen	3.900.000
5.01.01.2.03.006	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	laporan	3.900.000
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	100	persen	60.880.000
5.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	orang	15.000.000
5.01.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31	Orang	45.880.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	100	persen	56.858.000
5.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	Paket	8.800.000
5.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10	Paket	16.221.000
5.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	dokumen	1.140.000
5.01.01.2.06.008	Penyediaan Fasilitas Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	5.000.000
5.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	11.297.000
5.01.01.2.06.011	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	dokumen	14.400.000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	-	persen	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	Unit	-
5.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	100	persen	405.988.000
5.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	300.000
5.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	70.640.000
5.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	laporan	10.622.000
5.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14	laporan	324.426.000
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	100	persen	284.167.000
5.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	Unit	251.167.000
5.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	13.000.000
5.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20.000.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat Keterisian Data Pembangunan (SDI Bappenas) - Persentase Pencapaian Target Kinerja Program Pembangunan	100 85 94,07	persen persen persen	367.977.000
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	303.417.000
5.01.02.2.01.002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2	dokumen	32.515.000
5.01.02.2.01.005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	berita acara	123.350.000
5.01.02.2.01.007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	dokumen	147.552.000
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	33.662.000
5.01.02.2.02.001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	dokumen	33.662.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	100	persen	30.898.000
5.01.02.2.03.001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5	laporan	12.193.000
5.01.02.2.03.003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	laporan	18.705.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase keselarasan Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia - Persentase keselarasan Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD bidang Ekonomi - Persentase keselarasan Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100 100 100	persen persen persen	399.778.000
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan	100	persen	169.511.000
5.01.03.2.01.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	dokumen	29.000.000
5.01.03.2.01.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	28	laporan	55.781.000
5.01.03.2.01.005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5	dokumen	30.681.000
5.01.03.2.01.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6	laporan	54.049.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Ekonomi yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan	100	persen	102.448.000
5.01.03.2.02.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	dokumen	24.889.000
5.01.03.2.02.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4	laporan	46.874.000
5.01.03.2.02.008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2	laporan	30.685.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan	100	persen	127.819.000
5.01.03.2.03.001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	dokumen	60.991.000
5.01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2	laporan	33.673.000
5.01.03.2.03.004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3	dokumen	33.155.000
5.05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
5.05.02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	persen	980.913.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan invensi yang didesiminasikan	100	persen	156.758.000
5.05.02.2.04.001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	dokumen	55.322.000
5.05.02.2.04.004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4	laporan	101.436.000
5.05.03	<b>PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</b>	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah	100	persen	170.000.000
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase hasil riset dan inovasi daerah yang difasilitasi	100	persen	170.000.000
5.05.03.2.01.005	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1	laporan	170.000.000
		TOTAL			6.453.428.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja serta pagu indikatif, yang dirancang untuk secara strategis mendukung capaian Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Rencana tersebut juga bertujuan untuk memastikan pelayanan yang efektif dari Perangkat Daerah dalam menjalankan urusan pemerintah daerah. Implementasi rencana kerja dan pendanaan Bappelitbangda Tahun 2026 difokuskan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029, sekaligus mendukung Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Dalam menyusun rencana kerja dan pendanaan ini, Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga mengutamakan prinsip-prinsip manajemen yang efisien dan transparan. Pengelolaan anggaran yang cermat dan tepat waktu menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana tanpa mengalami kendala yang berarti. Hal ini penting mengingat adanya potensi keterbatasan anggaran yang perlu diantisipasi dengan strategi pengelolaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi eksternal maupun internal.

Sesuai dengan pedoman perencanaan daerah seperti Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan struktur SIPD berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dapat dilihat Rencana Kerja dan Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 pada tabel 4.1, sebagai berikut:

**Tabel IV. 1 Rencana Kerja Bappelitbangda Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01		PERENCANAAN									
5.01.01	Pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	BAPPELITB ANGDA	100	persen	5.358.915.000	DAU		100	5.571.133.000
5.01.01.2.01	Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun tepat waktu	BAPPELITB ANGDA	100	persen	110.656.000			100	110.656.000
5.01.01.2.01.00 01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPPELITB ANGDA	2	dokumen	4.000.000			2	4.000.000
5.01.01.2.01.00 07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPPELITB ANGDA	6	Laporan	106.656.000			6	106.656.000
5.01.01.2.02	Pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	BAPPELITB ANGDA	100	Persen	4.436.466.000			100	4.648.684.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.02.00 01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPPELITB ANGDA	31	Orang/bulan	4.287.266.000			31	4.499.484.000
5.01.01.2.02.00 02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPPELITB ANGDA	121	dokumen	102.880.000			121	102.880.000
5.01.01.2.02.00 04	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPPELITB ANGDA	600	dokumen	46.320.000			600	46.320.000
5.01.01.2.03	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase laporan BMD yang disusun sesuai ketentuan	BAPPELITB ANGDA	100	persen	3.900.000			100	3.900.000
5.01.01.2.03.00 06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPPELITB ANGDA	4	laporan	3.900.000			4	3.900.000
5.01.01.2.05	Meningkatnya pemahaman ASN sesuai dengan tugas fungsinya	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi kewajiban jam latihan	BAPPELITB ANGDA	100	persen	60.880.000			44	60.880.000
5.01.01.2.05.00 09	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BAPPELITB ANGDA	4	orang	15.000.000			11	15.000.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.05.0011	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPPELITB ANGDA	28	orang	45.880.000			44	45.880.000
5.01.01.2.06	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pemenuhan layanan administrasi umum	BAPPELITB ANGDA	100	persen	56.858.000			12	56.858.000
5.01.01.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BAPPELITB ANGDA	10	paket	8.800.000			10	8.800.000
5.01.01.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BAPPELITB ANGDA	10	paket	16.221.000			12	16.221.000
5.01.01.2.06.0006	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BAPPELITB ANGDA	12	dokumen	1.140.000			12	1.140.000
5.01.01.2.06.0008	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Penyediaan Fasilitas Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	BAPPELITB ANGDA	12	laporan	5.000.000			12	5.000.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.06.00 09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BAPPELITB ANGDA	12	laporan	11.297.000			12	11.297.000
5.01.01.2.06.00 11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BAPPELITB ANGDA	12	dokumen	14.400.000			12	14.400.000
5.01.01.2.07	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana kerja	BAPPELITB ANGDA	-	persen	-			-	-
5.01.01.2.07.00 02	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	BAPPELITB ANGDA	-	unit	-			-	-
5.01.01.2.07.00 06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BAPPELITB ANGDA	-	unit	-			-	-
5.01.01.2.08	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemenuhan jasa penunjang	BAPPELITB ANGDA	100	persen	405.988.000			12	405.988.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.08.00 01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BAPPELITB ANGDA	12	laporan	300.000			12	300.000
5.01.01.2.08.00 02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BAPPELITB ANGDA	12	laporan	70.640.000			12	70.640.000
5.01.01.2.08.00 03	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BAPPELITB ANGDA	2	laporan	10.622.000			12	10.622.000
5.01.01.2.08.00 04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BAPPELITB ANGDA	14	laporan	324.426.000			15	324.426.000
5.01.01.2.09	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD	BAPPELITB ANGDA	100	persen	284.167.000			12	284.167.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.01.2.09.00 02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BAPPELITB ANGDA	29	unit	251.167.000			29	251.167.000
5.01.01.2.09.00 06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BAPPELITB ANGDA	15	unit	13.000.000			15	13.000.000
5.01.01.2.09.00 09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BAPPELITB ANGDA	1	unit	20.000.000			1	20.000.000
5.01.02	- Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah - Tingkat ketersediaan data evaluasi pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian prosedur Dokumen perencanaan - Tingkat Keterisian Data Pembangunan (SDI Bappenas) - Persentase Pencapaian Target Kinerja Program Pembangunan	BAPPELITB ANGDA	100 85 94,07	persen persen persen	367.977.000			100 84 95,55	367.977.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.02.2.01	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPPELITB ANGDA	100	persen	303.417.000			100	303.417.000
5.01.02.2.01.00 02	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELITB ANGDA	2	dokumen	32.515.000			45	32.515.000
5.01.02.2.01.00 05	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BAPPELITB ANGDA	1	berita acara	123.350.000			24	123.350.000
5.01.02.2.01.00 07	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/R KPD)	BAPPELITB ANGDA	2	dokumen	147.552.000			5	147.552.000
5.01.02.2.02	Ketersediaan dokumen analisa data dan informasi sesuai ketentuan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPPELITB ANGDA	100	persen	33.662.000			100	33.662.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.02.2.02.00 01	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	BAPPELITB ANGDA	3	dokumen	33.662.000			1	33.662.000
5.01.02.2.03	ketersediaan dokumen evaluasi OPD	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	BAPPELITB ANGDA	100	persen	30.898.000			100	30.898.000
5.01.02.2.03.00 01	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	BAPPELITB ANGDA	5	laporan	12.193.000			2	12.193.000
5.01.02.2.03.00 03	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	BAPPELITB ANGDA	4	laporan	18.705.000			4	18.705.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah mitra kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</li> <li>- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah mitra kerja bidang ekonomi</li> <li>- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah mitra kerja bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</li> </ul>	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase keselarasan Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia</li> <li>- Persentase keselarasan Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD bidang Ekonomi</li> <li>- Persentase keselarasan Renstra dengan RPJMD dan Renja dengan RKPD bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</li> </ul>	BAPPELITB ANGDA	100 100 100	persen persen persen	399.778.000			100 100 100	399.778.000
5.01.03.2.01	OPD yang difasilitasi dalam penyusunan Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program bidang pemerintahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang	BAPPELITB ANGDA	100	persen	169.511.000			34	169.511.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	dan pembangunan manusia		diverifikasi sesuai dengan ketentuan								
5.01.03.2.01.00 01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITB ANGDA	5	dokumen	29.000.000			5	29.000.000
5.01.03.2.01.00 04	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	BAPPELITB ANGDA	28	laporan	55.781.000			28	55.781.000
5.01.03.2.01.00 05	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITB ANGDA	5	dokumen	30.681.000			5	30.681.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03.2.01.0008	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	BAPPELITB ANGDA	6	laporan	54.049.000			6	54.049.000
5.01.03.2.02	OPD yang difasilitasi dalam penyusunan Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program bidang perekonomian dan SDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Ekonomi yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan	BAPPELITB ANGDA	100	persen	102.448.000			5	102.448.000
5.01.03.2.02.0001	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	BAPPELITB ANGDA	1	dokumen	24.889.000			6	24.889.000
5.01.03.2.02.0004	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	BAPPELITB ANGDA	4	laporan	46.874.000			4	46.874.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03.2.02.0008	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	BAPPELITB ANGDA	2	laporan	30.685.000			2	30.685.000
5.01.03.2.03	OPD yang difasilitasi dalam penyusunan Renja, Renstra dan Laporan Kinerja Program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diverifikasi sesuai dengan ketentuan	BAPPELITB ANGDA	100	persen	127.819.000			6	127.819.000
5.01.03.2.03.0001	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	BAPPELITB ANGDA	1	dokumen	60.991.000			5	60.991.000
5.01.03.2.03.0004	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	BAPPELITB ANGDA	2	laporan	33.673.000			2	33.673.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.01.03.2.03.00 04	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	BAPPELITB ANGDA	3	dokumen	33.155.000			3	33.155.000
5.05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5.05.02	Penerapan kelitbangan dalam pembangunan daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	BAPPELITB ANGDA	100	persen	980.913.000			100	980.913.000
5.05.02.2.04	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi dan invensi yang didesiminasikan	BAPPELITB ANGDA	100	persen	156.758.000			70	156.758.000
5.05.02.2.04.00 01	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	BAPPELITB ANGDA	2	dokumen	55.322.000			321	55.322.000
5.05.02.2.04.00 04	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	BAPPELITB ANGDA	4	laporan	101.436.000			2	101.436.000

Kode	Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.05.03	penerapan riset dalam pembangunan daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi Daerah	BAPPELITB ANGDA	100	persen	170.000.000			100	170.000.000
5.05.03.2.01	Terlaksananya Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase hasil riset dan inovasi daerah yang difasilitasi	BAPPELITB ANGDA	100	persen	170.000.000			70	170.000.000
5.05.03.2.01.0005	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	BAPPELITB ANGDA	1	laporan	170.000.000			2	170.000.000
			TOTAL				6.453.428.000				6.665.646.000

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk memastikan kesuksesan implementasi, kaidah-kaidah pelaksanaan yang kuat harus ditegakkan. Ini mencakup aspek-aspek seperti transparansi dalam penggunaan anggaran, akuntabilitas atas setiap kegiatan yang dilaksanakan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. Dengan menjaga prinsip-prinsip ini, Bappelitbangda dapat membangun kepercayaan publik yang kokoh terhadap upaya pembangunan yang dilaksanakan, sehingga mendukung sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Rencana tindak lanjut yang terstruktur dengan baik juga menjadi aspek penting dalam menjamin kelancaran Renja ini. Evaluasi berkala terhadap capaian dan kinerja program menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas langkah-langkah yang telah diambil serta mengidentifikasi perubahan yang mungkin diperlukan. Fleksibilitas dalam merespons perubahan yang bisa saja terjadi akan memastikan bahwa Renja dapat tetap relevan dan responsif terhadap dinamika yang terjadi.

Sinergi antar stakeholder juga menjadi faktor penentu keberhasilan dalam implementasi Renja ini. Kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, sektor bisnis, dan masyarakat umum akan memperkuat dukungan serta meminimalisir potensi hambatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Dengan membangun hubungan kerja yang kuat dan saling mendukung, diharapkan Renja

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tahun 2026 dapat menjadi instrumen efektif dalam mengarahkan pembangunan daerah menuju keberlanjutan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat.

Purbalingga, 08 Juli 2025  
Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN PURBALINGGA



**Drs. SUROTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700203 199001 1 001

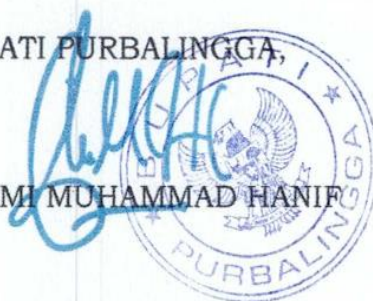
BAB III  
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

BUPATI PURBALINGGA,

FAHMI MUHAMMAD HANIF



Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

HERMI SULASTI



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 54